

# LAPORAN KINERJA KECAMATAN TEKUNG TAHUN 2025



## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN TEKUNG

Jln. Raya Tekung No. 29

[kecamatan.tekung@gmail.com](mailto:kecamatan.tekung@gmail.com)

TEKUNG 67381

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Tekung yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Rencana Strategis Kecamatan Tekung Tahun 2024 – 2026 pada awal tahun dan juga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada TW III guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Tekung Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 7 Januari 2026

Camat Tekung

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left that crosses itself, followed by a vertical line and a small flourish on the right.

**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 19771023 200501 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum.....	2
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	3
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah .....	9
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	10
1.2. Isu Strategis .....	16
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	20
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU .....	22
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>26</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.1.1. Pengukuran Kinerja.....	26
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja .....	28
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	29
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya .....	35
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2024- 2026 dan Renstra 2025-2029 .....	37
3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional .....	39
3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	41

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	46
3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	48
3.2. Realisasi Anggaran.....	54
3.2.1 Capaian Kinerja Lain .....	39
3.2.2 Inovasi .....	39
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>TABEL 1.1</b>	
Tabel Komposisi Pegawai .....	9
<b>TABEL 1.2</b>	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025 .....	10
<b>TABEL 2.1</b>	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tekung Berdasarkan P-Renstra 2024-2026 .....	19
<b>TABEL 2.2</b>	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tekung Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....	20
<b>TABEL 2.3</b>	
Perjanjian Kinerja Awal Kepala Kecamatan Tekung Tahun 2025 .....	20
<b>TABEL 2.4</b>	
Perubahan Kinerja Kepala Kecamatan Tekung Tahun 2025 .....	21
<b>TABEL 2.5</b>	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Lama (SK 100.3.3.2/517/427.12/2023) .....	22
<b>TABEL 2.6</b>	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (SK 100.3.3.2/405/427.12/2025) .....	24
<b>TABEL 3.1</b>	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja .....	27
<b>TABEL 3.2</b>	
Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	36
<b>TABEL 3.3</b>	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Tekung .....	37
<b>TABEL 3.4</b>	
Daftar Fasilitasi Tahun 2025 .....	29
<b>TABEL 3.5</b>	
Daftar Koordinasi Tahun 2025 .....	33
<b>TABEL 3.6</b>	
Daftar Rekomendasi tahun 2025 .....	34
<b>TABEL 3.7</b>	

Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023) .....	34
<b>TABEL 3.8</b>	
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026) .....	34
<b>TABEL 3.9</b>	
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029) .....	35
<b>TABEL 3.10</b>	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026 .....	36
<b>TABEL 3.11</b>	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029 .....	38
<b>TABEL 3.12</b>	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Lain .....	39
<b>TABEL 3.13</b>	
Rencana Tindak Lanjut .....	46
<b>TABEL 3.14</b>	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	47
<b>TABEL 3.15</b>	
Realisasi Anggaran 2025 .....	57
<b>TABEL 3.16</b>	
Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ..	57

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1.1</b>	
Struktur Organisasi Kecamatan Tekung .....	3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Tekung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

## **1.1. GAMBARAN UMUM**

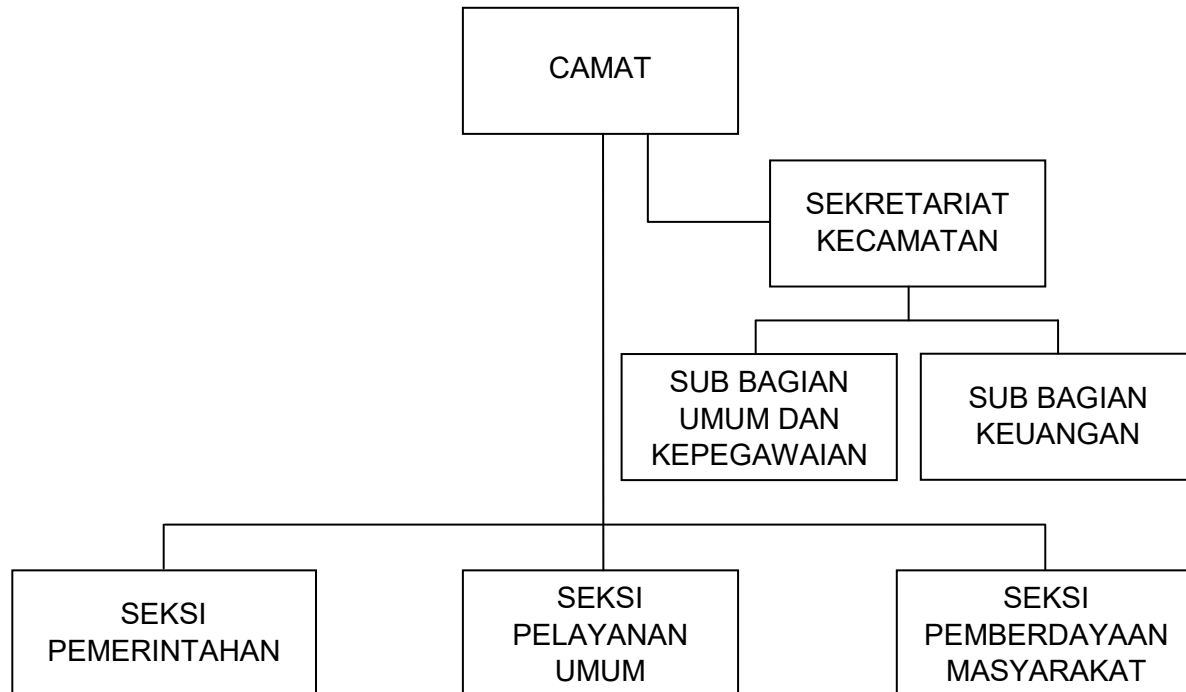
### **1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tekung, Kecamatan Tekung merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kewilayahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Tekung terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan adalah sebagaimana berikut:



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Tekung**

### 1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Tekung melaksanakan tugas Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan di wilayah Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Tekung menyelenggarakan fungsi :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**1. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk tugasnya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

**1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:**

1. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. melakukan administrasi kepegawaian;

7. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. melakukan administrasi barang milik daerah;
10. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**1.2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :**

1. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
8. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## 2. Seksi Pemerintahan,

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
3. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology negara dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang- undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

- 18.pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 19.melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 20.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- 21.pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- 22.melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- 23.mememberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- 24.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **3. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;

5. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### 1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Pasirian didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 18 orang (kondisi per 31 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Komposisi Pegawai**

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K PW	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4		
1.	Camat	1		1								1				1		
2.	Sekretaris	1		1								1				1		

3.	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1					1						1	
4.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1		1						1					1	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1						1					1	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1						1					1	
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1		1					1						1	
8.	Pejabat Pelaksana	10		10	7				6	1	2					
Jumlah		10		10	7				6	1	2				2	5

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Tekung per 31 Desember 2025 sebanyak 17 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang, pejabat pelaksana sebanyak 5 orang, pejabat PNS sebanyak 12 orang, dan PPPK PW sebanyak 7 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 87 % : 13 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 14 orang.

#### 1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tekung selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Tekung disajikan pada tabel 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025**

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jml Barang	Harga Perolehan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	132010304002	Portable Generating Set	2013	1	5.600.000
2	132010304002	Elektrik Generating Set	2020	1	27.100.000
3	132020101001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2016	1	16.743.000
4	132020101003	Station Wagon	2007	1	159.250.000

5	132020104001	Sepeda Motor	2006	1	9.667.000
6	132020104001	Sepeda Motor	2006	1	9.273.000
7	132020104001	Sepeda Motor	2017	1	18.650.000
8	132020201002	Gerobak Dorong	2015	1	750.000
9	132020201002	Gerobak Dorong	2015	1	750.000
10	132050101003	Mesin Ketik	2003	1	750.000
11	132050104001	Almari Arsip	2013	1	2.500.000
12	132050104001	Almari Arsip	2013	1	2.500.000
13	132050104001	Lemari Besi	2017	1	2.950.000
14	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	2012	1	1.250.000
15	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	2012	1	1.250.000
16	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	2012	1	1.250.000
17	132050104002	Lemari kayu	2018	1	3.900.000
18	132050104003	Rak Besi Arsip	2017	1	4.900.000
19	132050104004	Rak Kayu	2015	1	3.695.000
20	132050104005	Filing Kabinet	2014	1	2.500.000
21	132050104005	Filing Kabinet	2014	1	2.500.000
22	132050104005	Filling Kabinet	2015	1	2.000.000
23	132050104005	Filling kabinet	2018	1	2.225.000
24	132050104005	Filling kabinet	2018	1	2.225.000
25	132050104007	Brandkas	2006	1	3.350.000
26	132050104007	Brankas	2016	1	5.650.000
27	132050104027	Etalase	2010	1	725.000
28	132050105003	Papan Struktur Organisasi	1998	1	700.000
29	132050105019	Alat Pemotong Kertas	2014	1	2.500.000
30	132050105023	LCD / Proyektor	2015	1	12.000.000
31	132050105034	Papan : Nama Neon BOX	2015	1	6.800.000
32	132050105034	Papan : Nama Huruf Timbul (Back Drop)	2015	1	800.000
33	132050105034	Papan Nama Kecamatan ( Neon Box )	2016	1	3.250.000
34	132050105034	Running Text	2016	1	3.500.000
35	132050201005	Kursi Tamu / Zice	2009	1	2.500.000
36	132050201005	Kursi Tamu / Zice	2014	1	1.750.000
37	132050201005	Kursi Tamu / Zice	2011	1	1.750.000
38	132050201005	Meja / Kursi Tamu / Zice	2014	1	4.500.000

39	132050201008	Meja Rapat	2008	1	1.300.000
40	132050201008	Meja Rapat	2008	1	1.300.000
41	132050201008	Meja Rapat (ukbesar)	2014	1	2.000.000
42	132050201008	Meja Rapat (ukbesar)	2014	2.000.000	2.000.000
43	132050201013	Podium	2016	3.000.000	3.000.000
44	132050201014	Meja Pelayanan Umum	2010	2.775.000	2.775.000
45	132050201014	Meja Pelayanan Umum	2015	15.000.00 0	15.000.000
46	132050201017	Meja Pelayanan (Panjang)	2015	2.000.000	2.000.000
47	132050201017	Meja Pelayanan (Panjang)	2015	2.000.000	2.000.000
48	132050201017	Meja rapat panjang	2018	7.900.000	7.900.000
49	132050201025	Kasur	2017	4.500.000	4.500.000
50	132050201025	Spring bed	2018	4.950.000	4.950.000
51	132050201028	Meja makan	2017	2.000.000	2.000.000
52	132050201030	Kursi rapat	2018	1.250.000	1.250.000
53	132050201030	Kursi rapat	2018	1.250.000	1.250.000
54	132050201030	Kursi rapat	2018	1.250.000	1.250.000
55	132050201030	Kursi rapat	2018	1.250.000	1.250.000
56	132050201031	Kursi tamu	2017	4.800.000	4.800.000
57	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
58	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
59	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
60	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
61	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
62	132050201032	Kursi Putar	2016	1.500.000	1.500.000
63	132050201032	Kursi Putar	2016	1.500.000	1.500.000
64	132050201035	Bangku Tunggu	2014	3.000.000	3.000.000
65	132050201035	Bangku Tunggu	2014	3.000.000	3.000.000
66	132050201035	Kursi Pelayanan	2015	900.000	900.000
67	132050201035	Kursi Pelayanan	2015	900.000	900.000
68	132050201035	Kursi Pelayanan	2015	900.000	900.000
69	132050201035	Kursi Pelayanan	2015	900.000	900.000
70	132050201039	Meja Komputer / Meja Kerja	2007	1.000.000	1.000.000
71	132050201050	Taplak : Meja Rapat	2015	1	2.100.000
72	132050201050	Lemari pakaian	2017	1	2.000.000

73	132050201050	Punc Card	2006	1	4.150.000
74	132050201050	Lemari Piring	2017	1	1.600.000
75	132050201050	Taplak : Meja Rapat	2015	1	2.100.000
76	132050201050	Karpet (ukbesar)	2014	1	4.200.000
77	132050204001	Lemari es	2017	1	2.000.000
78	132050204003	AC / Air Conditioner	2012	1	5.000.000
79	132050204003	AC / Air Conditioner	2013	1	4.500.000
80	132050204003	AC / Air Conditioner	2017	1	7.450.000
81	132050204003	AC / Air Conditioner	2017	1	7.450.000
82	132050204003	AC	2018	1	4.325.000
83	132050204003	AC	2018	1	5.175.000
84	132050204003	AC	2019	1	3.600.000
85	132050204003	AC	2019	1	3.600.000
86	132050204006	Kipas Angin	2015	1	550.000
87	132050204006	Kipas Angin	2015	1	550.000
88	132050206002	Televisi / TV	2015	1	550.000
89	132050206002	Televisi	2015	1	550.000
90	132050206002	Televisi	C	1	2.600.000
91	132050206007	Perangkat Speker	2016	1	4.000.000
92	132050206008	Sound System	2017	1	2.500.000
93	132050206008	Sound Sytem	2005	1	1.500.000
94	132050206008	Sound System	2012	1	1.250.000
95	132050206012	Wirelles	2015	1	1.250.000
96	132050206018	UPS : Advence Power	2017	1	4.850.000
97	132050206018	UPS	2014	1	3.500.000
98	132050206018	UPS	2011	1	650.000
99	132050206019	STAVOLT	2016	1	2.250.000
100	132050206023	Kamera Digital / Tustel	2016	1	2.250.000
101	132050206023	Kamera Digital	2012	1	4.000.000
102	132050206036	Tangga Almunium	2013	1	2.500.000
103	132050206077	CCTV	2020	1	9.000.000
104	132050206077	CCTV	2015	1	2.000.000
105	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
106	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
107	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000

108	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
109	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
110	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
111	132050207001	Tabung Pemadam Kebakaran	2020	1	1.875.000
112	132050301005	Meja Es III	2020	1	1.875.000
113	132050301008	Meja Tulis / Staf	2017	1	3.000.000
114	132050301008	Meja Tulis / Staf	2005	1	3.466.400
115	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
116	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
117	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
118	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
119	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
120	132050303005	Kursi Es III	2000	1	750.000
121	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2000	1	750.000
122	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2005	1	1.485.600
123	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
124	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
125	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
126	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
127	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
128	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
129	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
130	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
131	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
132	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
133	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
134	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
135	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
136	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
137	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	2015	1	1.000.000
138	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	2015	1	1.000.000
139	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	2015	1	1.000.000
140	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	2015	1	1.000.000
141	132060201010	FAXIMILE : 2014	2014	1	1.750.000
142	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000

143	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
144	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
145	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
146	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
147	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
148	132060204001	Transceiver VHF / Ratel	2003	1	1.000.000
149	132100101004	Router Internet	2017	1	1.475.000
150	132100102001	Komputer	2003	1	2.000.000
151	132100102001	Komputer	2005	1	7.000.000
152	132100102001	Komputer	2005	1	7.000.000
153	132100102001	Komputer	2007	1	8.700.000
154	132100102001	Komputer / PC	2011	1	7.600.000
155	132100102001	Komputer-PC	2013	1	6.088.500
156	132100102001	Komputer PC (Lengkap)	2015	1	7.000.000
157	132100102001	Komputer PC (All in One)	2015	1	10.000.000
158	132100102001	KOMPUTER CPU LENGKAP	2016	1	6.000.000
159	132100102001	KOMPUTER CPU LENGKAP	2016	1	6.000.000
160	132100102001	Komputer	2018	1	7.975.000
161	132100102001	Komputer	2018	1	7.975.000
162	132100102002	Laptop	2013	1	7.301.250
163	132100102002	LAPTOP	2015	1	7.300.000
164	132100102002	LAPTOP : Asus	2015	1	9.000.000
165	132100102002	LOPTOP	2016	1	8.000.000
166	132100102002	LOPTOP	2016	1	8.000.000
167	132100102002	Laptop	2018	1	8.450.000
168	132100102002	Laptop	2018	1	8.450.000
169	132100203002	Monitor LCD : Fujitsu	2011	1	1.250.000
170	132100203003	Printer ( Scanner )	2010	1	3.500.000
171	132100203003	Printer	2017	1	840.000
172	132100203003	Printer	2015	1	4.390.000
173	132100203003	Printer	2017	1	840.000
174	132100203003	Printer ( Canon )	2011	1	600.000
175	132100203003	Printer	2017	1	840.000
176	132100203003	Printer ( Canon )	2011	1	600.000
177	132100203003	Printer	2017	1	840.000

178	132100203003	Printer ( Canon )	2011	1	600.000
179	132100203003	Printer : Epson L-100	2012	1	2.400.000
180	132100203003	Printer : Dotmatrik	2013	1	4.108.500
181	132100203003	Printer	2015	1	4.390.000
182	132100203003	Printer : Fuji Xerox	2015	1	1.400.000
183	132100203003	Printer	2007	1	5.750.000
184	132100203003	Printer	2018	1	6.950.000
185	132100203003	Printer Dot Matrik	2019	1	8.580.000
186	132100203003	Printer Tinta	2019	1	2.200.000
187	132100203003	Printer Tinta	2019	1	2.200.000
188	132100204004	Modem	2006	1	1.300.000
189	132100204004	MODEM WIFI	2016	1	500.000
190	132100204004	MODEM WIFI	2016	1	500.000
191	132100204004	MODEM WIFI	2016	1	500.000
Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin					770.637.250

## 1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Tekung di periode mendatang.

Isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Tekung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah yaitu “Tata kelola pemerintahan”.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

Pada awal Tahun 2025, Kecamatan Tekung masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Kecamatan Tekung telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025.

Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 → berlaku sampai Triwulan II 2025.
2. IKU baru berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 → berlaku mulai Triwulan III 2025.

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tekung ditampilkan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tekung Berdasarkan**  
**P-Renstra 2024-2026**

No	Sasaran/IKU	IKU Lama (SK 571/2023)	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
1.	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indikator: Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan indeks pelayanan publik kabupaten	65,5 (B-)	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
2.	Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indikator: Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	(Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi) x 100%	100	Sasaran dan target berubah dengan indikator tetap
3.	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Indikator: Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	[(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu+ Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu+Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu/ (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan Desa)] x 100%	100	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tekung**  
**Berdasarkan Renstra 2025-2029**

No	Sasaran/IKU	IKU Baru (SK 405/2025)	Satuan	Formulasi	Target 2025
1.	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indikator: Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	65.00
2.	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Angka	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	85.50
3.	Sasaran: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Indikator: Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ----- x 100 Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan	100

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tekung Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja setelah Renstra 2025-2029 Kecamatan Tekung adalah

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Awal Kepala Kecamatan Tekung Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.630.813.902
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.105.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.889.500
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.513.250
	<b>Jumlah</b>	<b>1.704.521.657</b>

**Tabel 2.4**

**Perubahan Kinerja Kepala Kecamatan Tekung Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	N/A	85.50
2.	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.829.679.572
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.080.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	78.939.500
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.650.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.942.549.042</b>

### 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023, tetap digunakan sampai dengan Triwulan II.

Setelah terbitnya P-RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK**  
**100.3.3.2/571/427.12/2023)**

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)	
	1. Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90%	
	a. Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1.609.836.966
	• Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	10.882.500
	• Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.285.002.555
	• Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	2.413.000
	• Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	54.723.731
	• Kegiatan 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100%	31.801.080

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	• Kegiatan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	187.710.600
	• Kegiatan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	37.303.500
	b. Program 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	1.080.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	1.080.000
	c. Program 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	35.739.500
	• Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	23.739.500
	• Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	12.000.000
	d. Program 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000
	• Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi	7.200.000
	2. Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88%	
	a. Program 1 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata – rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	29.250.000
	• Kegiatan 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	29.250.000

**Tabel 2.6**  
**Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (SK**  
**100.3.3.2/405/427.12/2025)**

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	60	
	1. Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85,50	
	a. Program 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	1.080.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	1.080.000
	2. Sasaran 2 Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	
	a. Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	1.609.836.966
	• Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	10.882.500
	• Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.285.002.555
	• Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	2.413.000
	• Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	54.723.731
	• Kegiatan 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah	100%	31.801.080
	• Kegiatan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	187.710.600
	• Kegiatan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	37.303.500

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	b. Program 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	35.739.500
	• Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	23.739.500
	• Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	12.000.000
	c. Program 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000
	• Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi	7.200.000
	d. Program 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata – rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	29.250.000
	• Kegiatan 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	29.250.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis

Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja**

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi per Triwulan				Realisa si Total	Capai an (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
<i>Data Awal (Renstra 2024-2026)</i>										
	Tujuan: Optimalnya penyelenggar aan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)				76,65 (B)	76,65 (B)	117,02	
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggar aan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	22,5 3%	14,6 %	31.45 %	31.45 %	100%	100	
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %	26%	41.7 %	16.15 %	16.15 %	100%	100	
<i>Data Perubahan (Renstra 2025-2029)</i>										
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	60				58.5	58.5	100,7	
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.5 0				82.94	82.94	82.94	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi per Triwulan				Realisa si Total	Capai an (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
	Sasaran 2: Mengoptimalk an Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %				99%	98%	100	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan berdasarkan Renstra 2024-2026 terealisasi sebesar 65.5 dengan capaian kinerja 100%.

Sedangkan Indikator kinerja tujuan berdasarkan Renstra 2025-2029 terealisasi sebesar 58.5 dengan capaian kinerja 100,7%

- **Sasaran Strategis**

Berdasarkan Renstra 2024-2026:

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi  $\geq 100\%$  sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Berdasarkan Renstra 2025-2029:

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi  $\geq 100\%$  sebanyak 1 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Tekung**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>Data Awal (Renstra 2024-2026)</i>					
	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)	76,65 (B)	117,02%
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	99%	99%
<i>Data Perubahan (Renstra 2025-2029)</i>					
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	60	58.5	100,7%
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85.50	82.94	96,87%
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	96%	96%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Tekung tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

**1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Kecamatan**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 60 terealisasi sebesar 58.5 dengan capaian 100,7 % atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

*Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.*

**2. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat**

Sasaran stategis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 85.50 , terealisasi sebesar 82.94 dengan capaian 96,87% atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Kecamatan Tekung kepada warga

sudah sangat baik yaitu dengan mengoptimalkan keterbatasan SDM serta sarana prasarana pendukung yang ada.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

*Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Hasil IKM Semester 1 (79.96) ditambah Hasil IKM Semester 2 (82.94) dibagi 2). Penilaian IKM ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang terhadap pemohon pelayanan di Kecamatan Tekung.*

**3. Sasaran Strategis 2:** Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 96% , terealisasi sebesar 96% dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Hal ini dapat diraih karena koordinasi serta komunikasi yang baik antara kecamatan Pasirian dengan pemerintah desa dan juga antar pegawai kecamatan Tekung. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, fasilitasi bisa dilaksanakan dengan maksimal sesuai perencanaan dan *time schedule*.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Daftar Fasilitasi Tahun 2025**

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	Jumlah
1	2	4	3	5	
1.	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;	1. Perdes Kewenangan Desa;	1. Rapat koordinasi	0
		2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam RPJMDes/ Perubahan RPJMDes;	2. Perdes RPJMDes/ Perdes P-RPJMDes/ Hasil Monitoring;	2. Dokumen/Laporan,	1
		3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	3. Perdes RKPDes;	3. SK Camat,	1
		4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	4. Perdes Perubahan RKPDes;	4. Rekomendasi,	1

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	Jumlah
1	2	4	3	5	
		5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;	5. Raperdes APBDes;	5. Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan	1
		6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;	6. Raperdes Perubahan APBDes;		1
		7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;	7. Perdes TKD;		1
		8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LPMD;	8. Perdes LPMD, Hasil monitoring LPMD;		1
		9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	9. Perdes BUMDes, Perdes Penyertaan modal BUMDes, Hasil Monitoring BUMDes,		1
2.	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	1. Administrasi Umum; a. Data Perangkat Desa b. Buku Perdes c. Buku SK		1
		2. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	2. Administrasi Penduduk; a. Buku Induk Penduduk b. Buku Mutasi Penduduk		1
		3. Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	3. Administrasi Keuangan; a. Buku APBDes b. Buku RAB		1
		4. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	4. Administrasi Pembangunan; a. Buku Kegiatan Pembangunan		1
		5. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	5. Administrasi Lainnya. a. Buku Administrasi BPD b. Buku Administrasi LKD		1

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	Jumlah
1	2	4	3	5	
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	1. Terlaksananya pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)		1
		2. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	2. Terlaksananya pembinaan Keuangan Desa (DPA & RAK)		1
		3. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	3. Terlaksananya pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa		1
		4. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	4. Terlaksananya pembinaan Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)		1
		5. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	5. Terlaksananya pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)		1
4.	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa		1
5.	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/ perangkat Desa dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades/ Perangkat Desa dan Pelaksanaan Pilkades	Hasil Monitoring Tupoksi Kades/ Perangkat Desa dan Fasilitasi Pilkades (Pembentukan Panitia Pilkades dan tersedianya Berkas administrasi Pilkades :BA Panwascam)		1
7.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD yang terlaksana		1
8.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	1. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	1. BA Musdes yang tersedia		1
		2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	2. BA Musrenbangdes yang tersedia		1
		3. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	3. BA Musrenbangcam yang tersedia		1

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	Jumlah
1	2	4	3	5	
		4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes/ Perubahan RPJMDes	4. Matriks Sinkronisasi RPJMDes/ Perubahan RPJMDes dengan RKPDes/ Perubahan RKPDes		1
		5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	5. Dokumen RKPDes yang tersedia		1
		6. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	6. Dokumen Perubahan RKPDes yang tersedia		1
10.	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Pembinaan LINMAS 2. Monev Trantibum	1. LINMAS terbina 2. Monev Trantibum terlaksana		1
					1
11.	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD		1
12.	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1. Fasilitasi Musdes yang partisipatif; 2. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif; 3. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif 4. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif 5. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	1. Daftar Hadir Musdes yang tersedia; 2. Daftar Hadir Musrenbangdes yang tersedia; 3. Daftar Hadir Musrenbangcam yang tersedia; 4. Daftar Hadir Penyusunan RKPDes 5. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RKPDes		1
					1
					1
					1
15.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan,	1. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes; 2. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam 3. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	1. BA Musrenbangdes yang tersedia 2. BA Musrenbangcam yang tersedia 3. RKPDes		1
					1
					1

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	Jumlah
1	2	4	3	5	
	Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	4. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	4. Perubahan RKPDes		1
16	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1. Fasilitasi Pengajuan Santunan Kematian 2. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	1. Santunan Kematian yang diverifikasi 2. Sosialisasi Pelayanan Publik yang terlaksana		1 1
17	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Laporan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tersedia		1
18	Fasilitasi Keuangan	1. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja 2. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1. Laporan Perencanaan dan Kinerja yang tersedia 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia 3. Laporan Keuangan yang tersedia 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tersedia		1 1 1 1

**Tabel 3.5**  
**Daftar Koordinasi Tahun 2025**

NO.	JENIS KOORDINASI	URAIAN KOORDINASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	
1.	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	Koordinasi Pendampingan Desa	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan seluruh Pendamping		1
2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	Daftar Usulan RKPDes yang tersedia		1

**Tabel 3.6**  
**Daftar Rekomendasi Tahun 2025**

NO.	JENIS REKOMENDASI	URAIAN REKOMENDASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	

1.	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diterbitkan		1
----	---	--	--	--	---

### 3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada Renstra 2025-2029 terdapat perbedaan tujuan dan sasaran dibandingkan dengan tujuan dan sasaran pada tahun-tahun sebelumnya yaitu berdasarkan Renstra 2024-2026. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)**

	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (S.d. Tribulan I)	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realis
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
an	957.200.000	326.953.200	957.200.000			1.515.081.192	324.724.240					158,28	99,32				-0,66	-3,6
arana	169.942.000	123.150.000	169.942.000			169.942.000	123.150.000					100,00	100				-0,28	-0,3
h an a dan	16.782.400	10.164.000	16.782.400			16.782.400	10.164.000					100,00	100				-0,39	-0,3
an	555.450.000	319.449.000	555.450.000			555.450.000	256.324.000					100	80				-0,42	-0,5
anjang a			1.295.331.620	1.553.550.570	1.661.970.500			1.230.956.500	1.052.061.930	404.227.112			95,03	67,72	24,32	0,23	0,97	
an dan lik			8.300.000	560.000	8.300.000			600.000	560.000	-			7	0	0	0	0	
sa			35.736.750	18.550.000	157.082.500			18.360.000	18.550.000	-			51	100	0	3,25	0	
inasi an um	-	-	-	-	13.150.000	-	-	-	-	600.000		0	0	0	0	0	0	
an	-	2.400.000	-			2.600.000	2.400.000	-				0	100	0	0	100	0	

	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							000										
inaan an Desa	208.170.000	194.400.000	216.100.000			255.400.000	192.600.000	48.600.000			123	99	22	123	99	-0,01	1,8

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
			T	R	C	T	R	C	
1	Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)	60,6 (B-)	101,65 %	65,5	76,5	117,02 %	
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	a Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	94,44 %	106,24 %	100 %	98%	108,89 %	
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	b Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	90,91 %	107,14 %	100 %	96%	113,64 %	

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Keterangan
			T	R	C	
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	60	58.5	100,7%	
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	A Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85.50	82.94	96,87%	
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	B Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	96%	96%	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Tekung memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Tekung memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada 1 indikator sasaran yang sama yaitu indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, indikator ini mengalami penurunan sebesar 6,2%.

Terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Terdapat perbedaan jumlah fasilitasi dan koordinasi pada formulasi perhitungan pada indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sehingga juga bisa mempengaruhi fasilitasi dan koordinasi yang bisa dicapai. Selain itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-Renja yang telah mengacu pada Renstra 2025-2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan III Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2024-2026 menuju Renstra 2025-2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daeah Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029.

### **3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

#### **3.1.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026**

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

**Tabel 3.10**

#### **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)	76,65 (B)	70,5 (B)	108,72%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	108,89%
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	96%	96%	113,79%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 70,5 dengan capaian sebesar 108,72 %. Untuk sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 90% dengan capaian 108,89%. Untuk sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 87,88% dengan capaian 113,79%.

Realisasi tujuan Kecamatan Tekung pada tahun berjalan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui ekspektasi, dengan capaian sebesar 108,72%. Angka ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melebihi target akhir yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasirian.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang melampaui target Renstra ini mengindikasikan bahwa perencanaan strategis yang disusun telah diimplementasikan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan aparatur kecamatan yang profesional dan responsif menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.

Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, maupun kapasitas sumber daya manusia. Penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan layanan publik, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan pemerintah desa turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja yang melampaui target.

### 3.1.2.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025-2029:

**Tabel 3.11**

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	60	58.2	63.50	97,44%
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85.50	82.94	88	94,17%
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	96%	96 %	98%

### 3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Pronojiwo tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.12**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Lain**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan Lain	Capaian
<b>Renstra 2024-2026</b>						
	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)	76,65 (B)	78,50 (B)	97,64%
	Sasaran 1: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90%	98%		
	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88%	100%		
<b>Renstra 2025-2029</b>						
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	75,52	89,74	84,15%
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	84,28		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan Lain	Capaian
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98%	98%		

Realisasi tujuan berdasarkan Renstra 2024-2026 yaitu Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini jika diperbandingkan dengan Kecamatan Pronojiwo, capaiannya sebesar 97,64%.

Sedangkan realisasi tujuan berdasarkan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan pada tahun ini jika diperbandingkan dengan Kecamatan Pronojiwo dengan karakteristik yang sama, capaiannya sebesar 84,15%.

### 3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

#### 3.1.2.5.1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Pasirian sebagian besar sudah memenuhi target serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

#### ➤ Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. **Tujuan** : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi  
Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, capaian kinerja tahun ini sebesar 117,02 % (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 15,37%. Sedangkan jika dibandingkan

dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 108,72%. Hal ini didukung dengan adanya:

- a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan dengan maksimal;
- b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Pasirian sehingga semua program pendukung tercapainya tujuan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Tekung perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
- b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada.

## 2. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti capaian kinerja tahun ini sebesar 108,89% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 2,65% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 108,89%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Tekung sehingga banyak fasilitasi yang bisa direalisasikan;
- b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Tekung sehingga semua program pendukung tercapainya sasaran bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Tekung perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan setiap kegiatan fasilitasi;

- b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Tekung baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
- b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada.

3. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu capaian kinerja tahun ini sebesar 113,64% (tercapai). jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 6,5% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 113,79%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa tetap bisa direalisasikan;
- b. Koordinasi yang baik antara Kecamatan Tekung dengan Pemerintahan Desa sehingga administrasi Pemerintahan Desa bisa ditetapkan tepat waktu.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Pasirian perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;

- b. Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan Tekung dengan pihak terkait seperti Tenaga Pendamping Desa untuk saling mendukung terlaksananya administrasi Pemerintahan Desa.

➤ **Berdasarkan Renstra 2025-2029**

1. **Tujuan** : Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Tujuan Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan, capaian kinerja tahun ini sebesar 100,7 % (tercapai). Namun tujuan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga tidak bisa diperbandingkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 97,44%. Hal ini didukung dengan adanya:

- a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga program serta kegiatan yang mendukung kinerja Kecamatan Tekung bisa terlaksana dengan baik;
- b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Tekung baik antara sesama pegawai maupun dengan lintas sektor juga pemerintah desa sehingga semua program pendukung tercapainya tujuan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Tekung perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi kecamatan;
- b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Tekung baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
- b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan-kegiatan yang ada.

2. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan, capaian kinerja tahun ini sebesar 96,87% (belum tercapai). Namun tujuan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga tidak bisa

diperbandingkan, Sedangkan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 94,17%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara maksimal dan masyarakat bisa merasa puas terhadap pelayanan yang didapatkan;
- b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Tekung sehingga semua program pendukung tercapainya sasaran bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan Tekung;
- b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Tekung baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
- b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada.

### 3. **Sasaran Strategis 2** : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai). jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 8,89% yang diakibatkan adanya perubahan jenis dan jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 98%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Tekung sehingga banyak fasilitasi dan koordinasi yang bisa dilaksanakan dengan baik;
- b. Koordinasi yang baik antara sesama pegawai Kecamatan Tekung dan juga dengan Pemerintahan Desa sehingga kegiatan fasilitasi dan koordinasi bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Tekung perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi;
- b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Tekung baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
- b. Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan Tekung dengan pihak terkait sehingga fasilitasi dan koordinasi bisa terlaksana dengan lebih baik lagi.

#### 3.1.2.5.2. Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Kecamatan Tekung telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026. Adapun rencana tindak lanjut perbaikan kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**

**Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026**

No	Permasalahan	Akar Penyebab	Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya
1	Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan belum optimal	1. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan	1. Mengadakan sosialisasi terkait pelayanan publik
		2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai	2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta melakukan pemeliharaan jika diperlukan
		3. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas	3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada serta mengarahkan untuk mengikuti pembinaan teknis jika ada
		4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	4. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada pemerintahan desa
		5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa	5. Mengadakan pembinaan kepada perangkat desa

#### 3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Tekung didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Pasirian dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	100,7%	79,85%	126,11%
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,87%	100%	96,87%
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	79,81%	125.3%

Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Meningkatnya Kinerja Kecamatan pada Kecamatan Tekung tahun 2025 sebesar Rp. 1.942.549.072 dan realisasinya sebesar Rp. 1.551.017.745 sehingga penyerapan anggaran sebesar 79,84%. Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa Kecamatan Tekung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 126,11%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Selain itu, dengan anggaran yang sebenarnya terbatas, Kecamatan Tekung mampu mengoptimalkan anggaran yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya indikator tujuan perangkat daerah.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Tekung tahun 2025 sebesar Rp.

1.080.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.080.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa Kecamatan Tekung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 96,87%, hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran belum mencapai 100% namun anggaran yang terealisasi sudah 100%. Dengan nilai efisiensi yang tidak mencapai 100% ini membuat Kecamatan Tekung melakukan evaluasi sehingga ke depannya tingkat efisien dapat tercapai secara maksimal.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan pada Kecamatan Pasirian tahun 2025 sebesar Rp. 1.942.549.072,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.551.017.745,- sehingga penyerapan anggaran hanya sebesar 79,84%. Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa Kecamatan Pasirian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 125,3%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai 100% namun anggaran hanya terealisasi sebesar 79,84%. Tingkat efisiensi ini sebenarnya dikarenakan adanya anggaran TPP 50% yang ditambahkan pada saat P-APBD namun tidak bisa diserap pada periode TW IV karena adanya perubahan kebijakan, sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal. Sebenarnya, anggaran yang ada sangat terbatas, Kecamatan Pasirian mampu mengoptimalkan anggaran yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya indikator sasaran perangkat daerah.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Tekung sebanyak 17 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 17 dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 69,23 %. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

### **3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirian ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**1. Tujuan 1** : Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Indikator : Sinergitas Kinerja Kecamatan, dengan target 60, realisasi 58.5 dan capaiannya 100,7%. didukung dengan sasaran strategis :

**a. Sasaran 1** : Meningkatnya kepuasan masyarakat

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Target untuk indikator ini adalah 100 dan realisasi 76,65 sehingga capaiannya 123,63%. Indikator program ini dapat terealisasi karena memaksimalkan SDM, sarana prasarana serta anggaran yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

**b. Sasaran 1 : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan**

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pemenuhan hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditunjang oleh 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 96.03% sehingga capaiannya 96.03%. Salah satu penyebab tidak tercapainya target adalah dikarenakan ada fasilitasi yaitu jumlah pegawai yang difasilitasi gaji dan tunjangannya tidak tercapai sesuai yang direncanakan karena ada pegawai yang pensiun. Sedangkan faktor pendukung pencapaian indikator program ini adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 87,5% sehingga capaiannya 87,5%. Target ini belum tercapai karena adanya pegawai yang pensiun di mana pegawai tersebut menjadi salah satu target yang yang ingin dicapai pada tahun berjalan.

- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhiya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhiya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhiya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang diukur dengan indikator persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 97.70% sehingga capaiannya 110,31%. Indikator

program ini dapat terealisasi karena memaksimalkan SDM yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang diukur dengan indikator persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai di atas target karena adanya penambahan aktivitas di luar perencanaan yang merupakan aktivitas mandatory.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena koordinasi dan kerja sama yang baik antar Forkopimka membuat keamanan di wilayah kecamatan Tekung menjadi kondusif.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang

diukur dengan indikator Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target 1 fasilitasi dan realisasi 1 fasilitasi sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena koordinasi dan kerja sama yang baik antar Forkopimka membuat keamanan di wilayah kecamatan Tekung menjadi kondusif.

- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator yaitu Persentase Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang ditetapkan Tepat Waktu dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Kecamatan Tekung selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tekung.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (kegiatan) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena baiknya koordinasi antara kecamatan dengan Pemerintahan Desa serta dengan memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

Dari penjabaran di atas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja di atasnya.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Anggaran Kecamatan Tekung tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.942.549.072,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 1.551.017.745,- atau sebesar 79,84%. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran 2025**

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI			%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	5	5	6 = 5/4	7
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.704.521.657,00</b>	<b>1.942.549.072,00</b>	<b>1.396.799.608,00</b>	<b>154.218.137,00</b>	<b>1.551.017.745,00</b>	<b>79,84</b>	<b>391.531.327,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.672.720.577,00</b>	<b>1.910.945.215,00</b>	<b>1.396.799.608,00</b>	<b>123.609.047,00</b>	<b>1.520.408.655,00</b>	<b>79,56</b>	<b>390.536.560,00</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.599.012.827,00</b>	<b>1.798.075.715,00</b>	<b>1.305.652.578,00</b>	<b>106.474.047,00</b>	<b>1.412.126.625,00</b>	<b>78,54</b>	<b>385.949.090,00</b>
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Barang	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	968.000,00	968.000,00	968.000,00	0,00	968.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	968.000,00	968.000,00	968.000,00	0,00	968.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	968.000,00	968.000,00	968.000,00	0,00	968.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>85,49</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>85,49</b>	<b>150.000,00</b>
Belanja Barang	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>2.552.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.552.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Barang	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00

<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>2.492.000,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>90,70</b>	<b>176.000,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.492.000,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>90,70</b>	<b>176.000,00</b>
Belanja Barang	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	1.232.000,00	1.232.000,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	85,71	176.000,00
Belanja Jasa Kantor	1.232.000,00	1.232.000,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	85,71	176.000,00
Belanja Lembur	1.232.000,00	1.232.000,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	85,71	176.000,00
Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Barang	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1.257.505.555,00</b>	<b>1.479.777.947,00</b>	<b>1.047.608.154,00</b>	<b>79.024.915,00</b>	<b>1.126.633.069,00</b>	<b>76,14</b>	<b>353.144.878,00</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.257.505.555,00</b>	<b>1.479.777.947,00</b>	<b>1.047.608.154,00</b>	<b>79.024.915,00</b>	<b>1.126.633.069,00</b>	<b>76,14</b>	<b>353.144.878,00</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	786.598.013,00	787.129.794,00	662.897.155,00	46.965.385,00	709.862.540,00	90,18	77.267.254,00
Belanja Gaji Pokok ASN	594.274.593,00	599.217.559,00	498.880.130,00	35.854.800,00	534.734.930,00	89,24	64.482.629,00
Belanja Gaji Pokok PNS	594.274.593,00	599.217.559,00	498.880.130,00	35.854.800,00	534.734.930,00	89,24	64.482.629,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	73.823.568,00	71.900.295,00	59.671.886,00	4.107.730,00	63.779.616,00	88,71	8.120.679,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	73.823.568,00	71.900.295,00	59.671.886,00	4.107.730,00	63.779.616,00	88,71	8.120.679,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	60.250.000,00	60.300.000,00	54.430.000,00	3.810.000,00	58.240.000,00	96,58	2.060.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	60.250.000,00	60.300.000,00	54.430.000,00	3.810.000,00	58.240.000,00	96,58	2.060.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	10.340.000,00	10.365.000,00	9.555.000,00	735.000,00	10.290.000,00	99,28	75.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.340.000,00	10.365.000,00	9.555.000,00	735.000,00	10.290.000,00	99,28	75.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	34.988.992,00	33.964.980,00	30.561.240,00	2.027.760,00	32.589.000,00	95,95	1.375.980,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	34.988.992,00	33.964.980,00	30.561.240,00	2.027.760,00	32.589.000,00	95,95	1.375.980,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.385.370,00	6.438.530,00	5.755.201,00	85.403,00	5.840.604,00	90,71	597.926,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.385.370,00	6.438.530,00	5.755.201,00	85.403,00	5.840.604,00	90,71	597.926,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.300,00	10.550,00	7.272,00	488,00	7.760,00	73,55	2.790,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.300,00	10.550,00	7.272,00	488,00	7.760,00	73,55	2.790,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.380.050,00	1.233.210,00	1.009.098,00	86.050,00	1.095.148,00	88,80	138.062,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.380.050,00	1.233.210,00	1.009.098,00	86.050,00	1.095.148,00	88,80	138.062,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.140.140,00	3.699.670,00	3.027.328,00	258.154,00	3.285.482,00	88,80	414.188,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.140.140,00	3.699.670,00	3.027.328,00	258.154,00	3.285.482,00	88,80	414.188,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN	470.907.542,00	692.648.153,00	384.710.999,00	32.059.530,00	416.770.529,00	60,17	275.877.624,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	470.907.542,00	692.648.153,00	384.710.999,00	32.059.530,00	416.770.529,00	60,17	275.877.624,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	470.907.542,00	692.648.153,00	384.710.999,00	32.059.530,00	416.770.529,00	60,17	275.877.624,00
<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>25.512.000,00</b>	<b>38.910.000,00</b>	<b>28.280.000,00</b>	<b>3.402.000,00</b>	<b>31.682.000,00</b>	<b>81,42</b>	<b>7.228.000,00</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>240.000,00</b>
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	1.440.000,00	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00	83,33	240.000,00
Belanja Insentif bagi ASN	0,00	1.440.000,00	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00	83,33	240.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	1.440.000,00	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00	83,33	240.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.512.000,00</b>	<b>37.470.000,00</b>	<b>27.320.000,00</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>30.482.000,00</b>	<b>81,35</b>	<b>6.988.000,00</b>
Belanja Jasa	25.512.000,00	37.470.000,00	27.320.000,00	3.162.000,00	30.482.000,00	81,35	6.988.000,00
Belanja Jasa Kantor	25.512.000,00	37.470.000,00	27.320.000,00	3.162.000,00	30.482.000,00	81,35	6.988.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.412.000,00	29.634.000,00	23.658.000,00	2.987.000,00	26.645.000,00	89,91	2.989.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.100.000,00	7.836.000,00	3.662.000,00	175.000,00	3.837.000,00	48,97	3.999.000,00
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Barang	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	100,00	0,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Barang	282.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	282.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	282.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
<b>Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>505.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>505.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Barang	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>							
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Jasa	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Barang	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Jasa	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	0,00
Belanja Lembur	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>28,83</b>	<b>348.000,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>28,83</b>	<b>348.000,00</b>
Belanja Barang	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	464.000,00	464.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	25,00	348.000,00
Belanja Jasa Kantor	464.000,00	464.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	25,00	348.000,00
Belanja Lembur	464.000,00	464.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	25,00	348.000,00
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>2.034.295,00</b>	<b>2.034.295,00</b>	<b>1.949.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.800,00</b>	<b>95,85</b>	<b>84.495,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.034.295,00</b>	<b>2.034.295,00</b>	<b>1.949.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.800,00</b>	<b>95,85</b>	<b>84.495,00</b>
Belanja Barang	2.034.295,00	2.034.295,00	1.949.800,00	0,00	1.949.800,00	95,85	84.495,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.034.295,00	2.034.295,00	1.949.800,00	0,00	1.949.800,00	95,85	84.495,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	2.034.295,00	2.034.295,00	1.949.800,00	0,00	1.949.800,00	95,85	84.495,00

Kantor-Alat Listrik								
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>24.804.377,00</b>	<b>9.453.436,00</b>	<b>9.379.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379.350,00</b>	<b>99,22</b>	<b>74.086,00</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.804.377,00</b>	<b>9.453.436,00</b>	<b>9.379.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379.350,00</b>	<b>99,22</b>	<b>74.086,00</b>	
Belanja Barang	24.804.377,00	9.453.436,00	9.379.350,00	0,00	9.379.350,00	99,22	74.086,00	
Belanja Barang Pakai Habis	24.804.377,00	9.453.436,00	9.379.350,00	0,00	9.379.350,00	99,22	74.086,00	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.528.112,00	963.986,00	926.700,00	0,00	926.700,00	96,13	37.286,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.231.845,00	3.376.130,00	3.371.070,00	0,00	3.371.070,00	99,85	5.060,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.044.420,00	5.113.320,00	5.081.580,00	0,00	5.081.580,00	99,38	31.740,00	
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
Belanja Barang	5.000.000,00	2.500.000,00	2.310.000,00	190.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	
Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	2.500.000,00	2.310.000,00	190.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000,00	2.500.000,00	2.310.000,00	190.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	
<b>Penyediaan Bahan/Material</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>594.400,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>99,80</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>594.400,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>99,80</b>	<b>1.600,00</b>	
Belanja Barang	816.000,00	816.000,00	594.400,00	220.000,00	814.400,00	99,80	1.600,00	
Belanja Barang Pakai Habis	816.000,00	816.000,00	594.400,00	220.000,00	814.400,00	99,80	1.600,00	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	816.000,00	816.000,00	594.400,00	220.000,00	814.400,00	99,80	1.600,00	
<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
Belanja Barang	2.250.000,00	2.250.000,00	1.552.000,00	698.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00	
Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	1.552.000,00	698.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.250.000,00	2.250.000,00	1.552.000,00	698.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00	
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>40.796.000,00</b>	<b>23.460.000,00</b>	<b>20.115.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>20.880.000,00</b>	<b>89,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.796.000,00</b>	<b>23.460.000,00</b>	<b>20.115.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>20.880.000,00</b>	<b>89,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	
Belanja Barang	10.800.000,00	10.800.000,00	9.405.000,00	765.000,00	10.170.000,00	94,17	630.000,00	
Belanja Barang Pakai Habis	10.800.000,00	10.800.000,00	9.405.000,00	765.000,00	10.170.000,00	94,17	630.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	9.405.000,00	765.000,00	10.170.000,00	94,17	630.000,00	
Belana Perjalanan Dinas	29.996.000,00	12.660.000,00	10.710.000,00	0,00	10.710.000,00	84,60	1.950.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.996.000,00	12.660.000,00	10.710.000,00	0,00	10.710.000,00	84,60	1.950.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.996.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	100,00	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00	10.200.000,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	80,88	1.950.000,00	
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>25.544.439,00</b>	<b>2.369.528,00</b>	<b>27.913.967,00</b>	<b>77,54</b>	<b>8.086.033,00</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>25.544.439,00</b>	<b>2.369.528,00</b>	<b>27.913.967,00</b>	<b>77,54</b>	<b>8.086.033,00</b>	
Belanja Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	25.544.439,00	2.369.528,00	27.913.967,00	77,54	8.086.033,00	
Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	25.544.439,00	2.369.528,00	27.913.967,00	77,54	8.086.033,00	
Belanja Tagihan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	12.399.899,00	1.174.888,00	13.574.787,00	75,42	4.425.213,00	
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	18.000.000,00	13.144.540,00	1.194.640,00	14.339.180,00	79,66	3.660.820,00	
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>151.710.600,00</b>	<b>154.640.037,00</b>	<b>128.242.570,00</b>	<b>14.673.064,00</b>	<b>142.915.634,00</b>	<b>92,42</b>	<b>11.724.403,00</b>	
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>151.710.600,00</b>	<b>154.640.037,00</b>	<b>128.242.570,00</b>	<b>14.673.064,00</b>	<b>142.915.634,00</b>	<b>92,42</b>	<b>11.724.403,00</b>	
Belanja Jasa	151.710.600,00	154.640.037,00	128.242.570,00	14.673.064,00	142.915.634,00	92,42	11.724.403,00	
Belanja Jasa Kantor	140.400.000,00	140.400.000,00	117.000.000,00	11.700.000,00	128.700.000,00	91,67	11.700.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	104.400.000,00	104.400.000,00	87.000.000,00	8.700.000,00	95.700.000,00	91,67	8.700.000,00	

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00	91,67	1.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00	91,67	1.500.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.310.600,00	14.240.037,00	11.242.570,00	2.973.064,00	14.215.634,00	99,83	24.403,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.206.000,00	10.206.000,00	9.354.653,00	850.423,00	10.205.076,00	99,99	924,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	491.400,00	491.400,00	408.194,00	81.639,00	489.833,00	99,68	1.567,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	613.200,00	613.200,00	510.248,00	102.051,00	612.299,00	99,85	901,00
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	0,00	2.929.437,00	969.475,00	1.938.951,00	2.908.426,00	99,28	21.011,00
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>31.503.500,00</b>	<b>31.503.500,00</b>	<b>25.341.365,00</b>	<b>3.810.540,00</b>	<b>29.151.905,00</b>	<b>92,54</b>	<b>2.351.595,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>31.503.500,00</b>	<b>31.503.500,00</b>	<b>25.341.365,00</b>	<b>3.810.540,00</b>	<b>29.151.905,00</b>	<b>92,54</b>	<b>2.351.595,00</b>
Belanja Barang	20.081.700,00	20.081.700,00	15.249.865,00	3.810.540,00	19.060.405,00	94,91	1.021.295,00
Belanja Barang Pakai Habis	20.081.700,00	20.081.700,00	15.249.865,00	3.810.540,00	19.060.405,00	94,91	1.021.295,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.081.700,00	20.081.700,00	15.249.865,00	3.810.540,00	19.060.405,00	94,91	1.021.295,00
Belanja Pemeliharaan	11.421.800,00	11.421.800,00	10.091.500,00	0,00	10.091.500,00	88,35	1.330.300,00

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Tekung Tahun 2025, terdapat beberapa area kinerja yang memerlukan perbaikan dan penguatan pada tahun 2026. Upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi terkait pelayanan publik;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta melakukan pemeliharaan jika diperlukan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada serta mengarahkan untuk mengikuti pembinaan teknis jika ada;
4. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada pemerintahan desa;
5. Mengadakan pembinaan kepada perangkat desa.

Rencana tindak lanjut ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu:

1. Sosialisasi Terkait Pelayanan Publik
  - o Menyusun materi sosialisasi yang mengacu pada standar pelayanan, SOP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - o Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan perangkat desa melalui pertemuan langsung maupun media informasi (banner, media sosial, dan website kecamatan).
  - o Melakukan evaluasi hasil sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Optimalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
  - o Melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan kecamatan.
  - o Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung kelancaran pelayanan dan administrasi pemerintahan.
  - o Menyusun jadwal pemeliharaan rutin serta mengusulkan perbaikan atau pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
3. Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - o Melakukan pembagian tugas yang proporsional sesuai dengan kompetensi dan beban kerja aparatur.

- Mengarahkan aparatur kecamatan dan perangkat desa untuk mengikuti pembinaan teknis, bimbingan teknis, atau pelatihan yang relevan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
  - Melakukan pembinaan internal secara berkala untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan etika pelayanan.
4. Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Pemerintahan Desa
- Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - Melaksanakan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dalam bidang administrasi, perencanaan, pelaporan, dan pelayanan kepada masyarakat.
  - Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut kebijakan.
5. Pembinaan Perangkat Desa
- Melaksanakan pembinaan kepada perangkat desa secara terstruktur dan berkelanjutan terkait tugas, fungsi, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - Memberikan arahan dan asistensi dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa, disiplin kerja, dan kualitas pelayanan publik.
  - Melakukan evaluasi hasil pembinaan sebagai dasar perbaikan kinerja perangkat desa ke depan.

Lumajang, 7 Januari 2026

Camat Tekung



**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**

NIP. 19771023 200501 1 009